

Hubungan indeks kualitas lingkungan hidup dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen

The relation of environmental quality index and income inequality in Kebumen Regency

F A Rohman¹ dan Suryanto¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Corresponding author's email: suryanto_feb@staff.uns.ac.id

Abstrak. Kabupaten Kebumen adalah kabupaten yang memiliki persentase jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah pada tahun 2021. Permasalahan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan dan juga menjadi pemicu utama terjadinya tekanan terhadap degradasi lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk melihat hubungan antara tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2018–2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat analisis Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan teknik uji korelasi pearson untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tingkat kemiskinan dan ketimpangan memiliki hubungan yang kuat dengan nilai -0.95 dan memiliki hubungan arah yang negatif. Begitu pula hasil uji korelasi variabel tingkat kemiskinan dengan variabel kualitas lingkungan hidup sebesar $-0,94$. Hubungan ini berarti terdapat hubungan negatif yang kuat antar dua variabel tersebut. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat mengembangkan lagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis dengan penjagaan kelestarian lingkungan serta kondisi alam dan juga mengurangi ketimpangan pendapatan, yakni penggalakan program pendidikan non formal, meningkatkan program pemberdayaan fakir miskin, pengembangan UMKM, pengembangan lingkungan sehat, serta pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Kata Kunci: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Williamson; Kebijakan Pengentasan Kemiskinan; Kemiskinan; Ketimpangan

Abstract. Kebumen Regency is a regency with the highest percentage of poverty in Jawa Tengah Province. Poverty is firmly related to inequality and is also a significant trigger for the pressure on environmental degradation. This research was conducted in Kebumen Regency, aiming to identify the relationship between the poverty levels, income inequality, and Kebumen Environmental Quality Index in 2018-2019. This research uses quantitative methods. The type of data used is secondary data. The data analysis method used in this study is the Williamson Index analysis tool to measure income inequality and Pearson correlation test techniques to perceive the strength of the relationship between variables. The correlation test results show that the relationship between the poverty level and inequality variables strongly correlates with the value -0.95 and has a negative directional relationship. Likewise, the correlation test results of the poverty level variable with the Environmental Quality Index variable also have a strong relationship with the value -0.94 and the antagonistic relationship's direction. The suggestion to the government is to develop more poverty reduction policies based on environmental preservation and natural conditions and also to reduce income inequality. We called for the promotion of non-formal education programs, increasing the empowerment program for the poor, developing MSMEs, developing a healthy environment, and developing management performance drinking water and wastewater.

Keywords: Environmental Quality Index; Income Inequality; Poverty Rate; Poverty Reduction Policy; Williamson Index

1. Pendahuluan

Kemiskinan dan ketimpangan adalah salah satu indikator utama dalam menghitung pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Dengan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dapat menunjukkan bahwa daerah itu adil dan Makmur [1,2]. Lebih lanjut, Ghosh menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu ketimpangan pendapatan [3]. Kasus-kasus ini terjadi negara-negara dengan ketimpangan tinggi [4].

Masalah kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari masalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam pembangunan. Berdasarkan perbedaan dalam infrastruktur dan kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, ketimpangan secara alami terjadi dalam perjalanan pembangunan ekonomi [5]. Meskipun pada prinsipnya, kesenjangan dalam pembangunan merupakan bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri [2]. Ketimpangan ekonomi biasa digunakan sebagai indikator pendapatan per kapita, kelompok tingkat pendapatan, kelompok pekerjaan, dan perbedaan daerah dalam pendapatan per kapita [6].

Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terletak di sebelah tengah dan selatan Pulau Jawa. Berdasarkan data persentase tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan tingkat penduduk miskin tertinggi pertama di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota per Maret 2019 [7].

Kemiskinan merupakan kontributor utama tekanan lingkungan, degradasi, dan kerusakan lingkungan yang sulit dihindari jika penduduk masih dililit kemiskinan. Intensitas penggunaan sumber daya meningkat karena merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka [3].

Penambangan pasir di wilayah Kabupaten Kebumen masih marak terjadi terutama di daerah Sungai Luk Ulo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Sumber Daya Air dan Energi Mineral Kabupaten Kebumen, area ekstraksi pasir mencapai 32,20 ha dan defisit pasir sekitar 20% per tahun. Defisit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara stok dan *flow* yang terjadi, misalnya ketika pasir diambil 10 truk, stok pasir dari hulu sungai hanya sekitar 8 truk. Selisih ini kemudian terakumulasi selama sekian waktu sehingga menyebabkan kekeringan di saat musim kemarau. Hal tersebut menjadi tanda bahwa kekeringan akan muncul di daerah yang terkena, bahkan ke hingga ke sumur-sumur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan bencana geologis yang disebabkan oleh perubahan struktur sungai dan mempengaruhi laju degradasi atau penurunan daya dukung alam.

Sebagai daerah dengan slogan *agriculture of Java*, Kabupaten Kebumen mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam dan lingkungan. Pada tahun 2019 sektor pertanian menyumbang sebesar 20,3% dari PDRB Kabupaten Kebumen dan merupakan sektor yang menyumbang pendapatan daerah terbesar. Ini menunjukkan bahwa lingkungan dan alam memainkan peran penting dalam kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kemiskinan adalah salah satu penyakit dalam perekonomian yang membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif, karena ini adalah masalah yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, perjuangan melawan kemiskinan perlu dilakukan dengan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan dilaksanakan secara terintegrasi [8].

Dengan melakukan kajian mengenai hubungan antara kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup, dapat diketahui bagaimana penekanan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Beberapa penelitian telah berhasil mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan [9–11]. Oleh karena itu, analisis terhadap peningkatan kualitas lingkungan dengan kemiskinan menjadi penting dilakukan [12,13]. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen tahun 2015 – 2019. Diharapkan dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Kebumen.

2. Metode

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengandalkan data sekunder, mencakup data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang bersumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimlh) Kabupaten Kebumen; data ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Williamson dan bersumber dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen; serta jumlah penduduk dan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

Analisis korelasi dilakukan menggunakan data level kecamatan selama 2 tahun (26x2). Periode waktu ini dipilih hingga tahun 2019 karena masih dalam kategori normal atau sebelum masa pandemi. Metode analisis pada penelitian kali ini menggunakan statistik inferensial dengan teknik analisis korelasional atau korelasi Pearson.

Teknik analisis menggunakan Indeks Williamson dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Indeks Williamson (IW)} = \left\{ \frac{(Y_i - Y_{rata\ rata})^2 F_i / N}{Y} \right\} 0.5$$

Keterangan:

Y = income riil per kapita kabupaten/kota

Y_i = income per kapita kecamatan

F_i = jumlah penduduk kecamatan

N = jumlah penduduk kabupaten/kota

Adapun untuk teknik analisis korelasi Pearson dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Korelasi} = r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$$

$$\text{Korelasi} = r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Keterangan:

S_{xy} = kovarian x dan y

S_x = standar deviasi x

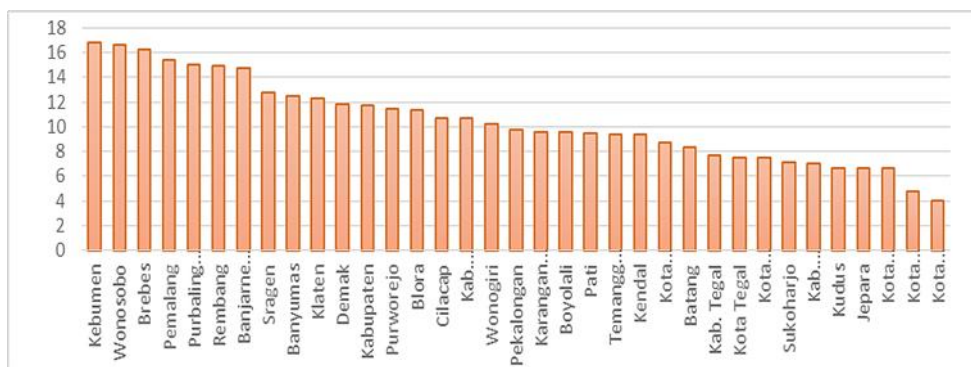
S_y = standar deviasi y

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Bagian ini akan dimulai dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, yakni kemiskinan, indeks kualitas hidup, dan ketimpangan pendapatan atau wilayah.

3.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan merupakan masalah dasar yang pasti terdapat pada setiap daerah. Kemiskinan dilihat sebagai keadaan penduduk yang ekonominya masih rendah.



Gambar 1. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah 2019 [7].

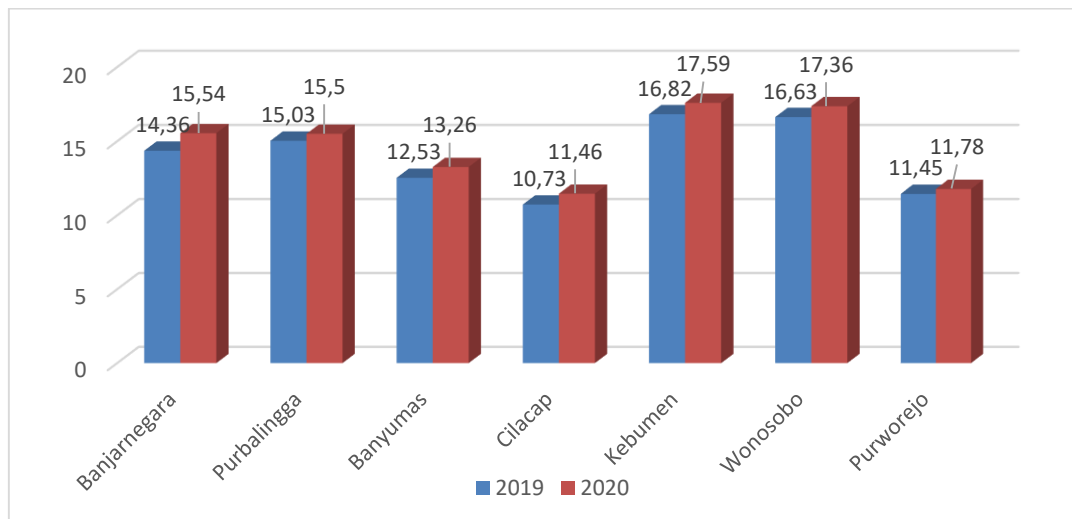
Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen cukup memprihatinkan. Kabupaten Kebumen menempati posisi pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yakni 16,82%. Angka ini merupakan angka tertinggi setelah melewati Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 yang menempati posisi pertama dengan persentase sebesar 16,63%. Meskipun Kabupaten Kebumen menempati posisi pertama sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen terus berkurang sejak tahun 2015-2019 (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2019 [7].

Berdasarkan Gambar 2, sejak tahun 2015-2019 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen turun 3,62% dengan rata-rata 0,91% per tahun atau berkurang sebanyak 40.560 jiwa dengan rata-rata 10.140 jiwa per tahun. Kendati demikian, penurunan tingkat kemiskinan dengan nilai

rata-rata sebesar 0,91% masih berada di bawah rata-rata penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.



Gambar 3. Perbandingan tingkat kemiskinan tahun 2019 dan 2020.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen lebih tinggi daripada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 dan sejak tahun 2019 Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Perbandingan tersebut juga dapat dijadikan perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Program pembangunan yang dijalankan sudah berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan, namun secara akselerasi pengurangan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen masih tertinggal. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, komprehensif, dan tepat sasaran. Perumusan kebijakan-kebijakan ini membutuhkan data-data dasar mengenai kondisi Kabupaten Kebumen, baik dari aspek ekonomi, sosial, ataupun demografi.

Evaluasi terhadap kebijakan dan strategi penurunan kemiskinan perlu dilakukan mengingat program pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan. Berdasarkan identifikasi dari data di lapangan, diketahui bahwa selain faktor aksesibilitas juga terdapat masalah mental [12,14,15]. Pembenahan terhadap hal ini juga direkomendasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

3.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan gambaran atau perhitungan awal yang memberikan kesimpulan secara cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Perhitungan IKLH Kabupaten Kebumen adalah dengan menghitung rata-rata Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air, sedangkan Indeks Tutupan Hutan tidak digunakan karena urusan kehutanan merupakan wewenang pemerintah provinsi.

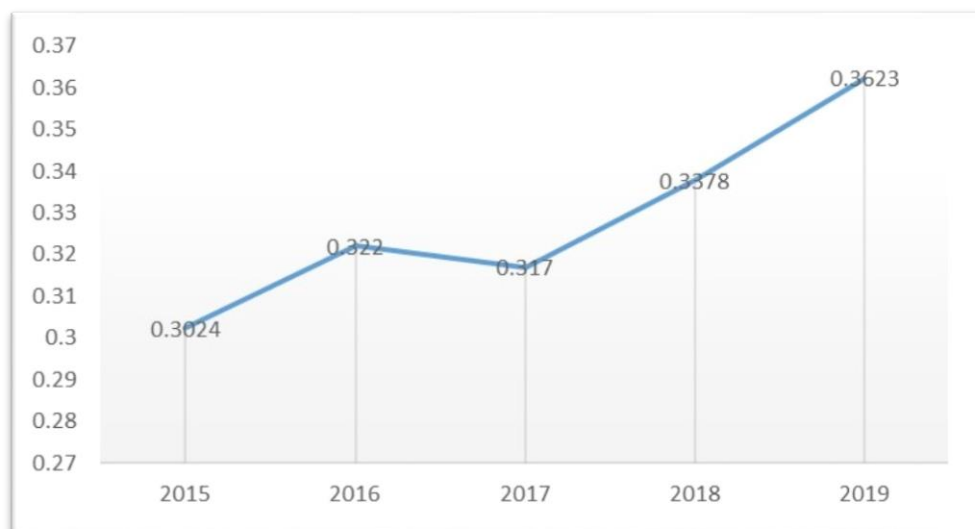
Tabel 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tahun 2015 -2019 [16].

Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Udara	Point/Indeks	73,17	75	93,3	87,83	88,44
Indeks Kualitas Air	Point/Indeks	46,67	51,25	56,67	56,67	63,33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point/Indeks	59,92	61,56	68,67	72,25	75,89

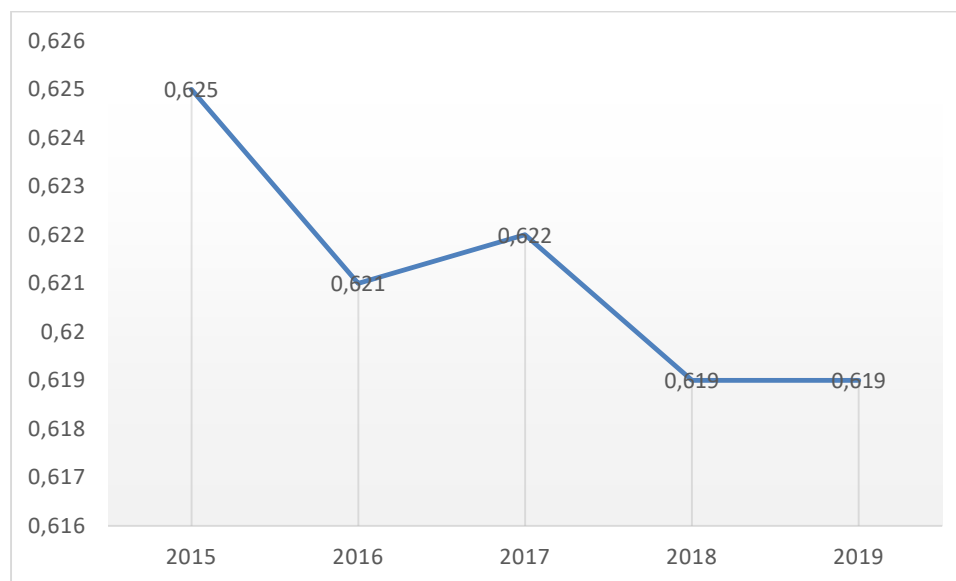
Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki nilai yang cenderung meningkat dan cukup baik, yakni 61,56 pada tahun 2016; lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 68,67; tahun 2018 sebesar 72,25 dan meningkat menjadi kategori baik; serta pada tahun 2019 sebesar 75,89.

3.3. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan gambaran sukses atau tidaknya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Bila pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak diikuti oleh pengurangan kesenjangan maka dapat dikategorikan pembangunan ekonomi tidak sukses [2,5]. Perhitungan ketimpangan pendapatan pada penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson. Gambar 4 menunjukkan hasil tingkat kesenjangan ekonomi di Kabupaten Kebumen.

**Gambar 4.** Indeks Williamson Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Gambar 4, secara umum dapat diketahui bahwa nilai Indeks Williamson Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai yang cenderung meningkat. Kabupaten Kebumen memiliki nilai ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson terbesar pada tahun 2019 yaitu 0,362, sedangkan yang terkecil pada tahun 2015 yaitu 0,302 dengan tingkat ketimpangan yang fluktuatif dan cenderung naik. Kabupaten Kebumen sempat menunjukkan adanya perbaikan ditinjau dari menurunnya nilai Indeks Williamson yang menunjukkan angka 0,322 di tahun 2016, kemudian turun menjadi 0,317 pada tahun 2017.



Gambar 5. Indeks Williamsson Provinsi Jawa Tengah [17].

Apabila dibandingkan dengan Indeks Williamsson Provinsi Jawa Tengah (lihat Gambar 5), angka ketimpangan wilayah di Kabupaten Kebumen relatif lebih baik. Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah tercatat berada di atas angka 0,5 sehingga termasuk kategori tinggi, sementara Kabupaten Kebumen berada di bawah 0,5.

3.4. Hubungan antara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan kemiskinan di Kabupaten Kebumen

Tabel 2 memperlihatkan hasil uji korelasi antara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tingkat kemiskinan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa besarnya koefisien korelasi antara IKLH dan kemiskinan sebesar -0,94 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,01. Nilai koefisien tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan berbanding terbalik antara kondisi lingkungan yang diwakili dengan IKLH dengan tingkat kemiskinan selama tahun 2018-2019. Dari hasil uji korelasi tersebut dapat dikatakan bahwa ketika tingkat kemiskinan meningkat, maka kualitas lingkungan di Kabupaten Kebumen akan meningkat.

Tabel 2. Hasil korelasi antara IKLH dengan kemiskinan.

Variabel	IKLH	Kemiskinan
IKLH	1,00	-0,94
Kemiskinan	-0,94	1,00

Hasil korelasi ini menunjukkan apabila kemiskinan akan memaksa aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartiasih dan Pribadi, kemiskinan sangat bergantung pada kondisi alam dan sumber daya [18]. Lebih lanjut disebutkan bahwa kemiskinan akan menurunkan kualitas lingkungan meski tidak ditemukan pengaruh degradasi lingkungan terhadap kemiskinan. Sebagian besar penduduk di

Kabupaten Kebumen adalah petani sehingga patut diduga bahwa pengelolaan sumber daya air dan lahan menyebabkan degradasi lingkungan. Menurut Adi, pengelolaan tanah pertanian di Kabupaten Kebumen sudah menemukan adanya residu herbisida [19].

Gbetibouo et al. menyimpulkan bahwa masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim termasuk ke dalam kelompok-kelompok marginal [20]. Hal ini karena perubahan iklim menyebabkan kegagalan panen sehingga pada akhirnya mereka akan semakin miskin. Kemudian, tuntutan hidup memaksa mereka untuk hidup bergantung pada sumber daya alam. Sementara Heger menyebutkan dalam studinya bahwa penanganan lingkungan yang baik akan berdampak pengurangan kemiskinan [21].

3.5. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan di Kabupaten Kebumen
Hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kebumen dapat ditinjau melalui uji korelasi. Dapat ditinjau pada Tabel 3 bahwa besarnya koefisien korelasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan adalah sebesar -0.95 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.01. Koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen selama tahun 2018-2019, namun berbanding terbalik satu sama lain.

Tabel 3. Hasil korelasi antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan.

Variabel	Indeks Williamson	Kemiskinan
IW	1.00	-0.95
Kemiskinan	-0.95	1.00

Hasil tersebut dapat menjelaskan kondisi Kabupaten Kebumen yang mengalami kenaikan ketimpangan ketika tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain disparitas pembangunan yang tidak merata, serta terdapat pendapat Kuznets melalui kurva U terbalik yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan suatu negara atau wilayah ditandai oleh ketimpangan yang cenderung naik [2]. Tingkat ketimpangan yang meningkat dapat dijelaskan juga dari penelitian Anakusara dan Jamal bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan [1]. Penduduk miskin yang tidak memperoleh akses terhadap pembangunan tetap menjadi miskin, sebaliknya penduduk yang mendapatkan akses akan semakin meningkat kesejahteraannya [4].

4. Kesimpulan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kebumen mempunyai hasil yang cukup baik dan terus meningkat dalam kurun 2015-2019. Sementara itu, berdasarkan analisis korelasi dengan data tingkat kecamatan pada tahun 2018-2019 diperoleh hasil bahwa IKLH Kabupaten Kebumen mempunyai hubungan negatif yang kuat dengan tingkat kemiskinan dengan nilai -0,94.

Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah di Kabupaten Kebumen sebenarnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah meskipun nilainya fluktuatif dan cenderung naik pada kurun waktu 2015-2019. Analisis ketimpangan pembangunan wilayah dan tingkat kemiskinan tingkat kecamatan 2018-2019 di Kabupaten Kebumen memiliki hubungan negatif dengan nilai korelasi -0,95.

Rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis dengan penjagaan kelestarian serta kondisi alam dan juga mengurangi ketimpangan pendapatan antara lain:

- a) Program pemberdayaan fakir miskin melalui pendidikan non formal dan pengembangan UMKM

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tingkat ketimpangan yang relatif kecil dengan distribusi pendapatan yang relatif merata, namun dengan tren yang cenderung naik. Oleh karena itu, kebijakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui sekolah non-formal dan pengembangan UMKM merupakan kebijakan yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

- b) Program pengembangan daerah tertinggal

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa ketika tingkat kemiskinan turun, justru ketimpangan pendapatan Kabupaten Kebumen naik. Kondisi ini bisa disebabkan beberapa hal, antara lain disparitas pembangunan yang tidak merata dan pendapat Kuznets yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan pada suatu negara atau wilayah ditandai oleh ketimpangan yang cenderung naik. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Kebumen melalui optimalisasi tingkat aksesibilitas antar daerah dengan cara melengkapi ketersediaan infrastruktur terutama jalan serta memperkuat keterkaitan sosial ekonomi.

- c) Program pengembangan lingkungan sehat dengan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Air merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagian penduduk Kabupaten Kebumen masih menggunakan air sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan airnya. Sementara itu, salah satu indikator IKLH adalah kualitas air sungai, sehingga kebijakan terkait perlu dikembangkan lebih lanjut agar kebutuhan air penduduk Kabupaten Kebumen tercukupi. Pendekatan pembangunan berdasarkan kawasan ini bisa membantu untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Masyarakat yang hidup di tempat tinggal kurang layak huni berkorelasi dengan tingkat sanitasi yang buruk, sedangkan sanitasi yang buruk akan menurunkan kualitas hidup. Pada akhirnya, hal tersebut juga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Referensi

- [1] Anakusara R, Jamal A, Seftarita C, Maipita I. Economic Growth and Employment in Agricultural Sector on Poverty in Aceh Province. *Trikonomika* 2019;18:1–7. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v18i1.1513>.
- [2] Hassan SA, Zaman K, Gul S. The Relationship between Growth-Inequality-Poverty Triangle and Environmental Degradation: Unveiling the Reality. *Arab Econ Bus J* 2015;10:57–71. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.007>.

- [3] Ghosh J. Growth, Industrialisation and Inequality in India. *J Asia Pacific Econ* 2015;20:42–56. <https://doi.org/10.1080/13547860.2014.974316>.
- [4] Sarkodie SA, Adams S. Electricity Access and Income Inequality in South Africa: Evidence from Bayesian and NARDL Analyses. *Energy Strateg Rev* 2020;29:1–11. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100480>.
- [5] Ferreira FHG, Leite PG, Ravallion M. Poverty Reduction Without Economic Growth? Explaining Brazil's Poverty Dynamics, 1985-2004. *J Dev Econ* 2010;93:20–36. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.06.001>.
- [6] Riden S. Kemiskinan dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan. *J Litbang Sukowati Media Penelit Dan Pengemb* 2020;5:39–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>.
- [7] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan 2017-2019. BPS Provinsi Jawa Tengah n.d. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/2/kemiskinan.html> (accessed January 5, 2023).
- [8] Astuti EW. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). *Econ Dev Anal J* 2018;7:162–85. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i2.23415>.
- [9] Hitam M Bin, Borhan HB. FDI, Growth and the Environment: Impact on Quality of Life in Malaysia. *Procedia - Soc Behav Sci* 2012;50:333–42. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.038>.
- [10] Ong SM, Sek SK. Interactions Between Economic Growth and Environmental Quality: Panel and Non-Panel Analyses. *Appl Math Sci* 2013;7:687–700. <https://doi.org/10.12988/ams.2013.13062>.
- [11] Borhan H, Ahmed EM, Hitam M. Co2, Quality of Life and Economic Growth in ASEAN 8. *J ASIAN Behav Stud* 2018;3:55. <https://doi.org/10.21834/jabs.v3i6.237>.
- [12] Sangadah SK, Laut LT, Jalunggono G. Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2018. *Din Dir J Econ* 2018;2:2018.
- [13] Suryanto S, Rahman A. Application of Livelihood Vulnerability Index to Assess Risks for Farmers in The Sukoharjo Regency and Klaten Regency, Indonesia. *Jamba J Disaster Risk Stud* 2019;11:1–9. <https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.739>.
- [14] Saepudin T, Acuviarta A. The Community Empowerment Program to Reduction Poverty in Banjar. *Trikonomika* 2016;15:8–13. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v15i1.390>.
- [15] Thaker MAMT, Thaker HMT, Amin MF, Pitchay AA. Electricity Consumption and Economic Growth: A Revisit Study of Their Causality in Malaysia. *Etikonomi* 2019;18:1–12. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.01.048>.
- [16] Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen Tahun 2019 2019.
- [17] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2016-2020. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah; 2021.
- [18] Kartiasih F, Pribadi W. Environmental Quality and Poverty Assessment in Indonesia. *J Nat Resour Environ Manag* 2020;10:89–97. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.89->

97.

- [19] Abdurahman A. Degradasi Tanah Pertanian Indonesia Tanggung Jawab Siapa? Tabloid Sinar Tani 2003.
- [20] Gbetibuou GA, Ringler C, Hassan R. Vulnerability of the South African Farming Sector to Climate Change and Variability: An Indicator Approach. *Nat Resour Forum* 2010;34:175–87. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2010.01302.x>.
- [21] Heger M, Zens G, Bangalore M. Does the Environment Matter for Poverty Reduction? The Role of Soil Fertility and Vegetation Vigor in Poverty Reduction. Washington, DC: 2018. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8537>.